

KERJASAMA ANTARPROVINSI UNTUK PEMBANGUNAN REGIONAL KALIMANTAN YANG TERINTEGRASI¹

Tim Kajian²

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III
Lembaga Administrasi Negara
Jl. HM. Ardans, SH. (Ring Road III) Samarinda
Email: kajianaparatur@gmail.com

Abstract

This research is aimed to find out of what and how the regional cooperation in Kalimantan applied, as well as to know its effectiveness and problem. Then, this research is also aimed to search the prospect of Kalimantan Incorporated which is expected to accelerate regional development in Kalimantan. The method used in this research is combination of descriptive method with qualitative approach and evaluation method with formal evaluation approach. Data are collected by focus group discussion (FGD), interview, and secondary data. Results of this research are: (1) Regional cooperation in Kalimantan is applied in joint formed authorities namely coordination and consultation forum of FRKP2RK and a board of KTB; (2) The effectiveness of the cooperation is in low performance, because the cooperation forum works as pra-musrenbang meeting only to invent problems and proposals which will be discussed in the regional musrenbang and proposed to relevant ministry. This cooperation has no action plan in concrete program and activity forms; (3) The opportunity to realise integrated development of Kalimantan Incorporated is quite prospective, by optimizing the forum into more concrete programs and activities. It needs commitment from all provinces and supported by business actors (private or BUMN/BUMD) and people as three pillars of development.

Keywords : province cooperation, regional development, Kalimantan incorporated.

Intisari

Penelitian ini bertujuan mengetahui apa dan bagaimana hubungan kerja antarprovinsi di Kalimantan, serta melihat efektivitas dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya dilihat prospek terwujudnya *Kalimantan Incorporated* yang diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di

¹ Naskah diterima: 10 Januari 2012, revisi: 19 Maret 2012.

² Penulis terdiri atas: Andi Wahyudi, Mariman Darto, Siti Zakiyah, Maria AP. Sari, Tri Noor Aziza, Lia Rosliana, Lina Maulana, Wildan Lutfie A., Fani Heru Wismono, Rustan A.

Kalimantan. Metode penelitian ini adalah perpaduan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode evaluasi dengan pendekatan evaluasi formal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan *focus group discussion* (FGD), wawancara serta pengumpulan data sekunder. Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis disimpulkan beberapa hal yaitu: (1) Hubungan kerjasama antarprovinsi dalam lingkup regional Kalimantan diwujudkan dengan membentuk otoritas bersama (*joint formed authorities*) yaitu forum koordinasi dan konsultasi berupa FRKP2RK dan sebuah badan yang bernama KTB; (2) Efektivitas hubungan kerja tersebut masih rendah, karena forum tersebut hanya sebatas forum pra-musrenbang regional untuk menginventarisasi persoalan dan usulan yang akan dibahas di forum musrenbang regional maupun dibawa ke kementerian terkait, belum sampai kepada rencana aksi berupa program dan kegiatan yang konkrit; (3) Prospek terwujudnya pembangunan Kalimantan yang terpadu (*Kalimantan Incorporated*) cukup terbuka, dengan mengoptimalkan forum tersebut ke dalam program dan kegiatan yang lebih kongkrit dan perlu komitmen dari semua provinsi dan didukung oleh para pelaku usaha (swasta maupun BUMN/BUMD) serta masyarakat sebagai tiga pilar pembangunan.

Kata kunci: kerjasama antarprovinsi, pembangunan regional, Kalimantan terintegrasi.

A. PENDAHULUAN

Potensi dan kemampuan masing-masing daerah baik provinsi, kabupaten dan kota yang berbeda menimbulkan saling ketergantungan satu daerah kepada daerah lain dalam komoditas tertentu. Perbedaan potensi dan kemampuan juga bisa menyebabkan efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik menjadi berbeda pula. Hal ini berpotensi terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah.

Selain itu, semakin tingginya mobilitas masyarakat berpotensi melunturkan batas-batas antar wilayah, dalam arti bahwa walaupun secara administratif setiap daerah baik kabupaten/kota dan provinsi memiliki batas yang sudah jelas tetapi aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak

terpaku pada batas-batas wilayah tersebut, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, dampak ataupun ekses yang muncul dari interaksi masyarakat akan semakin meluas melewati batas-batas wilayah administratif. Oleh karena itu, diperlukan kreatifitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pelayanan publik di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Kerjasama antara daerah merupakan alternatif yang bisa dilakukan untuk menutup berbagai keterbatasan serta mengembangkan potensi yang dimiliki.

Beberapa contoh praktek kerjasama antarprovinsi telah dilakukan di beberapa wilayah antara lain di Jawa dan Sulawesi. Di Jawa, kerjasama antarprovinsi diwujudkan

dalam wadah Mitra Praja Utama (MPU) yang melibatkan seluruh provinsi di Pulau Jawa ditambah Provinsi Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Agenda kegiatan MPU antara lain adalah pertemuan antar gubernur sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi program tahunan. Pada 2009, para gubernur dalam MPU mengeluarkan Keputusan Bersama No. 47/SK/MPU/2009 tentang Rekomendasi kepada Pemerintah, yang memuat berbagai isu/permasalahan di bidang pertanian, ketenagakerjaan, pekerjaan umum, sosial, kesehatan, perempuan, dan komunikasi.

Di Sulawesi, kerjasama antarprovinsi dituangkan dalam bentuk Badan Kerjasama Pemerintah Regional Sulawesi (BKPRS) yang melibatkan seluruh provinsi di Sulawesi, sebagai wujud *common interest* dan merupakan kepedulian serta komitmen provinsi di Sulawesi untuk mengembangkan potensi dan membangun regional Sulawesi secara bersama-sama. BKRS terbentuk karena kebutuhan bersama sehingga melalui sinergi pembangunan antardaerah bisa meningkatkan daya saing dalam kerangka kemajuan regional Sulawesi.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana forum kerjasama antarprovinsi di Kalimantan tersebut, serta efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan forum kerjasama untuk mewujudkan pembangunan daerah di Kalimantan. Selanjutnya dikaji peluang terwujudnya *Kalimantan Incorporated*

yang diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan daerah di Kalimantan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perpaduan metode deskriptif dan metode evaluasi. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif memaparkan berbagai data, informasi dan fenomena yang ada berkaitan dengan hubungan kerja antar pemerintah provinsi di Kalimantan. Pendekatan kualitatif menitikberatkan kreatifitas berpikir peneliti sebagai alat untuk mengolah data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, diperlukan kreatifitas dan kepekaan peneliti dalam menangkap fenomena dan menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi.

Metode evaluasi digunakan pendekatan evaluasi formal. Menurut William N. Dunn, evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan atas dasar tujuan dan sasaran program kebijakan yang telah diinformasikan secara formal kepada publik. Tujuan dan sasaran tersebut bisa dilacak dari berbagai peraturan perundangan, dokumen-dokumen program serta wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan administrator.³

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu melakukan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan para pejabat dari unit

³ Lihat William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gama Press. Hal. 612-615.

kerjasama dan perencanaan pembangunan daerah. Pemilihan dari unit-unit tersebut dengan alasan karena unit-unit ini yang lebih banyak berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan hasil-hasil kerjasama. Kemudian wawancara dengan *key informant* di masing-masing lokus dalam rangka pendalaman informasi serta pengumpulan data-data sekunder. Perpaduan ketiga metode pengumpulan data tersebut diharapkan bisa melengkapi semua data yang diperlukan dalam melakukan analisis secara komprehensif.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif didasarkan atas interpretasi terhadap data seperti apa, kenapa, siapa, di mana dan bagaimana data tersebut. Data yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan adalah data kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data.

C. KERJASAMA DAERAH

Kerjasama antar daerah serta kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga secara teoritis maupun yuridis memiliki dasar yang cukup. Perlunya kerjasama antar daerah sebagaimana dikemukakan oleh Yeremias T. Keban⁴ karena beberapa alasan yaitu:

1. Pihak-pihak yang bekerjasama

dapat membentuk *kekuatan yang lebih besar*. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat *disinergikan* untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

2. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai *kemajuan yang lebih tinggi*. Dengan kerjasama, masing-masing daerah akan mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama.
3. Pihak-pihak yang bekerjasama *dapat lebih berdaya*. Dengan kerjasama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan.
4. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat *memperkecil atau mencegah konflik*. Dengan kerjasama, daerah-

⁴ Keban, Yeremias T., *op.cit.*

daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.

5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.
6. Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjakamkan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
7. Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama tersebut, kecenderungan ego daerah dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.

Pemerintah, melalui PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah, telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain dan juga pihak ketiga dalam rangka mengoptimalkan potensinya dan memecahkan masalah yang dihadapi. Bahkan dalam pelaksanaan kerjasama

tersebut, berdasarkan Pasal 24 PP tersebut, dapat dibentuk suatu badan kerjasama apabila kerjasama tersebut dilakukan setidaknya dalam waktu lima tahun.

Penelitian tentang hubungan kerjasama antar daerah pernah dilakukan berbagai pihak. PKP2A I LAN pada 2002 melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Kerjasama Pembangunan antar Daerah ini mengambil lokus di pemerintah daerah kabupaten/kota di beberapa provinsi yaitu Kota Manado (Sulut), Kota Pontianak (Kalbar), Kota Cirebon (Jabar), Kota Jambi (Jambi), Kota Palembang (Sumsel), Kota Semarang (Jateng), Kabupaten Madiun (Jatim), dan Kabupaten Badung (Bali).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi model-model kerjasama antar daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik. Hasil penelitian ini menyimpulkan 6 (enam) model yang bisa dikembangkan dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah, yaitu: (1) Kerjasama usaha dengan membentuk kelembagaan baru; (2) Kerjasama usaha tanpa membentuk kelembagaan baru; (3) Kerjasama non usaha dengan membentuk kelembagaan baru; (4) Kerjasama non usaha tanpa membentuk kelembagaan baru (fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat); (5) Kerjasama bantuan teknis (*technical assistance*); (6) Kerjasama kepanitiaan bersifat *ad-hoc*.⁵

Di Universitas Sumatera Utara, sebuah Karya Tulis ditulis oleh

⁵Dawud, Joni, et. al., 2003, *Hubungan Kerjasama Pembangunan antar Daerah*, Bandung: PKDA I LAN, hal. 126-146.

Murbanto Sinaga tentang Model Kerjasama Antar Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yaitu kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan kabupaten/kota dengan maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airline dalam melayani kebutuhan transportasi udara di wilayah pantai barat dengan mengoperasikan Sutra Airline. Kerjasama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di kawasan pantai barat Sumatera dilakukan dalam hal penanggulangan biaya operasional, sedangkan kerjasama pemerintah provinsi dengan maskapai penerbangan sebagai operator penerbangan.⁶

Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah - Bappenas melakukan studi dengan judul Pengembangan Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah: Persoalan dan Peluangnya. Studi ini menggunakan metode eksplorasi konsep dan *desk study*, eksplorasi empiris, pengolahan data dan analisis, serta melakukan pendalaman kasus kerjasama pembangunan sektoral dan daerah di lapangan, dengan mengambil lokus/sampel kawasan Merapi Yogyakarta, Forum Kemitraan Pembangunan Ekonomi Bali, kawasan Joglo-Semar (Yogyakarta, Solo, dan Semarang), serta pengembangan kawasan Pawonsari yang melibatkan Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan Wonosari.⁷

Penelitian ini mengidentifikasi pola kerjasama pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi dua yaitu kerjasama antar sektor pada daerah tertentu, dan kerjasama antar daerah. *Pertama*, kerjasama antar sektor pada daerah tertentu terlihat dari dua contoh kerjasama yaitu yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (KTNGM) dan Forum Kemitraan Pembangunan Ekonomi Bali (FKPEB). Pada KTNGM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, keterlibatan berbagai sektor pemerintah seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Bappeda, mulai level Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten bahkan sampai tingkat desa dalam mengurus penetapan status hukum dan membuat perencanaan tentang pengelolaan dan penataan KTNGM. Sedangkan pada FKPEB yang melibatkan berbagai stakeholder baik pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. FKPEB berperan sebagai fasilitator kelompok produsen (petani, nelayan dan pengrajin) dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar berpihak kepada pengembangan ekonomi lokal, serta memfasilitasi peningkatan kompetensi para produsen agar produknya mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.

Kedua, kerjasama antar daerah teridentifikasi ada empat kerjasama di beberapa daerah yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi baik dalam lingkup satu

⁶Sinaga, Murbanto, 2005, "Model Kerjasama Antar Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah", Karya Tulis Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dalam <http://library.usu.ac.id/download/fe/06009591.pdf> diunduh 7 Juli 2011.

⁷Anonim, Pengembangan Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah: Persoalan dan Peluangnya, Jakarta: Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah – Bappenas, tanpa tahun.

provinsi maupun lintas provinsi. Yaitu (1) pengembangan kawasan segitiga Joglosemar (Jogja, Solo, dan Semarang) yang awalnya justru diinisiasi oleh swasta; (2) pengembangan kawasan Pawonsari (Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari) yang meliputi tiga provinsi yaitu Jatim, Jateng dan Yogyakarta untuk bersama-sama mengembangkan potensi dan memecahkan permasalahan bersama di kawasan tersebut; (3) kerjasama Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran; (4) pengelolaan program transmigrasi di Kaltim bekerjasama dengan pemerintah daerah pengirim transmigran seperti Jawa Barat, Jatim, dan Bali.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal yaitu *pertama*, diperlukan Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah (KPSD) yang bisa dilakukan berdasarkan pokok persoalan yang sedang berkembang, seperti soal sektoral, eksternalitas daerah otonom dan fungsi interdependen antar daerah. *Kedua*, tanggapan yang muncul atas pokok persoalan tersebut di antaranya: (1) monitoring perkembangan sektoral dan daerah; (2) analisis kebutuhan kerjasama sektoral dan daerah. *Ketiga*, berbagai bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan KPSD antara lain adalah: (1) keterlibatan pihak swasta; (2) kesadaran untuk saling bekerja sama; (3) inisiator kerjasama sektor dan daerah. *Keempat*, terdapat kendala pelaksanaan dan pengembangan KPSD, yakni: (1) perbedaan

kepentingan dan prioritas; (2) besarnya harapan terhadap pemerintah pusat; (3) kuatnya peran pemerintah pusat; (4) permasalahan dana; dan (5) dokumen legalitas sebagai payung kerja sama.

Tjahjanulin Domai⁸ melakukan penelitian tentang kerjasama antardaerah dalam perspektif *sound governance* di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal yaitu: (1) Penentuan bidang yang dikerjasamakan dilakukan melalui identifikasi permasalahan perkotaan w i l a y a h Y o g y a k a r t a d i m a n a diputuskan enam bidang sarana dan prasarana sebagai agenda kebijakan dan penetapan kebijakan yaitu tempat pembuangan sampah akhir, instalasi pengelolaan air limbah, drainasi, jalan, transportasi, dan air bersih; (2) Penetapan tim penyusunan program pembangunan prasarana dan sarana kota terpadu (pembentukan sekretariat bersama/Sekber) oleh gubernur yang kemudian ditindaklanjuti surat keputusan bersama oleh bupati/walikota tentang pembentukan Sekber Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul); (3) Keberhasilan implementasi kerjasama tiga daerah tersebut didukung oleh kewenangan penuh yang diberikan kepada Sekber Kartamantul untuk mengelola prasarana dan sarana wilayah perkotaan Yogyakarta dan didukung oleh tenaga pengelola yang profesional, komitmen yang tinggi, komunikasi yang efektif antara Sekber Kartamantul dengan ketiga daerah,

⁸ Tjahjanulin Domai. (2009). *Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Daerah (Studi Kerjasama Antar Daerah dalam Perspektif Sound Governance)*. Disertasi doktor. Malang: Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

koordinasi yang terarah, kapasitas yang memadai, perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ketiga daerah, kebijakan yang jelas tertuang dalam nota kesepahaman serta manajemen dan kepemimpinan yang kuat; (4) Dalam pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan ini dipilih pola kerjasama oleh ketiga daerah karena dengan kerjasama maka biaya yang dipikul lebih ringan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah, dan melalui kerjasama dapat menjadi kekuatan kolektif dalam mengatasi permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain, kesenjangan potensi sumber daya, ego daerah, harapan yang tinggi terhadap kerjasama dan potensi lingkungan yang tidak mendukung; (5) Dalam membangun kerjasama ketiga daerah berdasarkan pengalaman masing-masing daerah dalam menangani permasalahan perkotaan, ketiga daerah menggunakan strategi adaptif, proaktif, reaktif, dan akomodatif, sedangkan model yang digunakan untuk membangun kerjadama ketiga daerah menggunakan model otonom, interdependensi dan model elit.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Kalimantan (Borneo) merupakan pulau terbesar di Indonesia. Sebagian besar merupakan wilayah Indonesia dan sebagian lagi merupakan wilayah Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia yang terletak di bagian utara, serta Brunei Darusalam. Wilayah teritorial Indonesia di Kalimantan dibagi menjadi 4 (empat) provinsi, yaitu Kaltim, Kalsel, Kalteng dan Kalbar dengan luas 536.342,69 km². Luas wilayah empat provinsi ini

dihuni oleh sekitar 13,1 juta jiwa penduduk dengan kepadatan penduduk rata-rata 24 jiwa/km².

Perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan berada di Provinsi Kaltim dan Kalbar, dengan garis perbatasan sepanjang 1.885,3 km. Wilayah perbatasan di Kaltim melintasi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Kutai Barat sepanjang 1.038 km. Sedangkan garis perbatasan yang berada di Provinsi Kalbar melintasi 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 847,3 km.

Sebagai regional yang luas dengan jumlah penduduk yang sedikit, Kalimantan memiliki potensi dan kendalanya sendiri. Kondisi faktual yang dihadapi masyarakat di Kalimantan secara umum adalah minimnya fasilitas infrastruktur dasar yang memadai seperti jalan raya dan listrik. Minimnya infrastruktur dasar menyebabkan sebagian masyarakat di beberapa wilayah masih terisolasi dan jauh dari akses pelayanan publik sehingga menyebabkan mereka tertinggal dibandingkan masyarakat yang lain. Wilayah yang sangat luas namun dihuni oleh jumlah penduduk yang sedikit merupakan satu kendala lain dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pemberian pelayanan publik. Minimnya infrastruktur dasar yang menunjang aksesibilitas masyarakat serta berbagai fasilitas lain terutama di kawasan perdesaan, pedalaman dan kawasan perbatasan menjadikan daerah-daerah tersebut tertinggal oleh kawasan lain yang dekat dengan perkotaan. Selama ini kawasan-

kawasan yang jauh dari perkotaan dan minim fasilitas infrastuktur lebih mengandalkan transportasi sungai dan

transportasi udara (penerbangan perintis).

Tabel 1. Perbandingan Luas Wilayah Daratan dan Jumlah Penduduk di Kalimantan Tahun 2009

Provinsi	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kalimantan Timur	198.441,17	3.164.800	16
Kalimantan Selatan	37.530,52	3.496.125	93
Kalimantan Tengah	153.564,00	2.131.693 *)	14
Kalimantan Barat	146.807,00	4.319.142 **)	29
Total	536.342,69	13.111.760	24

Sumber: diolah dari berbagai sumber

*)data tahun 2010

**)proyeksi

Selain batas wilayah administratif dikenal juga batas wilayah fungsional (sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas administratif). Dalam kenyataannya berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Alasan utama diperlukan kerjasama antardaerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.⁹

Di regional Kalimantan hubungan kerjasama antar provinsi, berdasarkan ruang lingkup wilayahnya, bisa dibedakan menjadi 2 (dua). **Pertama** adalah hubungan antar

provinsi di wilayah regional Kalimantan atau dalam penelitian ini disebut sebagai Kerjasama Regional Kalimantan. Yaitu kerjasama antar lebih dari dua provinsi dalam lingkup wilayah regional Kalimantan. **Kedua** adalah hubungan kerjasama bilateral, yaitu hubungan kerjasama antar dua provinsi.

1. Praktek Kerjasama Regional di Kalimantan

a. Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK)

Berdasarkan hasil penggalan data lapangan, diperoleh informasi bahwa di regional Kalimantan terdapat forum kerjasama antar provinsi dalam rangka percepatan pembangunan regional Kalimantan. Forum tersebut

⁹ Keban, Yeremias T., tanpa tahun, *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu, Strategis, Bentuk dan Prinsip*, dalam <http://www.bappenas.go.id/node/48/2258/kerjasama-antar-pemerintah-daerah-dalam-era-otonomi-oleh-yeremias-t-keban/>, diunduh 25 Januari 2011.

adalah Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang melibatkan semua provinsi di Kalimantan. Sesuai dengan ruang lingkup dan namanya maka FKRP2RK merupakan bentuk Kerjasama Regional Kalimantan.

Forum kerjasama tersebut telah dirintis sejak 1986 sebagai forum koordinasi dan konsultasi pembangunan di Kalimantan serta secara bersama-sama memperjuangkan kepentingan pembangunan regional Kalimantan di tingkat nasional. Melalui forum tersebut, berbagai rencana program dibahas dan disinergikan untuk selanjutnya dibawa ke Forum Musrenbang Regional Kalimantan maupun ke Kementerian terkait. Forum ini bermuara untuk meningkatkan pelayanan publik, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di regional Kalimantan melalui penentuan kebijakan, program dan kegiatan bersama secara sinergis.

Forum pra-Musrenbang Regional ini menjadi sarana koordinasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan daerah di wilayah Kalimantan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional. Menurut informan di Bappeda Kalsel, dengan keberadaan forum tersebut terjadi perubahan strategi dari sebelumnya mengundang masing-masing Kementerian terkait kemudian berubah menjadi kunjungan/*road show* empat gubernur ke masing-masing Kementerian terkait. Langkah ini mendapat sambutan positif dari Kementerian karena menjadi lebih

fokus untuk mendengarkan kebutuhan-kebutuhan daerah yang disampaikan oleh para gubernur.

“Dulu forum ini mengundang Kementerian, kemudian berubah menjadi *road show* ke Kementerian. Dari beberapa kunjungan *road show* ke Kementerian, pihak Kementerian menyambut baik dengan menghadirkan pejabat-pejabat mulai dari Eselon II sampai Eselon IV, sehingga aspirasi daerah bisa disampaikan langsung ke Kementerian.”¹⁰

Melalui pola seperti ini maka diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tindak lanjut dari perencanaan program yang telah disampaikan, terutama program yang bersifat lintas provinsi serta memerlukan biaya besar karena aspirasi daerah sudah disampaikan langsung ke tingkat Kementerian.

Kerjasama antar provinsi ini difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masing-masing provinsi sebagai *leading sector* pelaksanaan kerjasama. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Bappeda yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan salah satu misinya adalah menyusun rencana pembangunan daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, integratif, komprehensif sesuai kondisi dan potensi daerah. Dan untuk dapat melaksanakan tugas perencanaan

¹⁰ Wawancara dengan pejabat Bappeda Kalimantan Selatan di Kantor Bappeda Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 20 Juni 2011.

pembangunan secara komprehensif ini tidak lepas dari upaya untuk mensinergikan efektifitas pembangunan daerah dengan pembangunan kawasan. Fasilitas kerjasama ini dilakukan mulai dari merancang dan mengkoordinir jadwal pertemuan baik pertemuan antar gubernur maupun pertemuan dengan Kementerian, sampai pada koordinasi *follow up* program yang telah disepakati.

Untuk operasionalisasi forum tersebut, dibentuk Sekretariat Bersama yang tempatnya bergilir mengikuti koordinator yang dipilih selama masa kepengurusan 2 tahun. Pada periode 2011-2012, Kalsel menjadi koordinator, menggantikan Kalbar yang telah menjadi koordinator periode 2009-2010. Dalam forum ini dibentuk kelompok-kepompok kerja (Pokja) untuk mempermudah perumusan permasalahan dan usulan yang akan dibawa ke forum-forum lanjutan baik di lingkup regional Kalimantan seperti Musrenbangreg maupun tingkat nasional. Pokja tersebut terdiri atas:

1. Pokja Bidang Ekonomi
2. Pokja Bidang Infrastruktur
3. Pokja Bidang Tata ruang

Dampak positif yang mulai dirasakan dari adanya forum ini, menurut informan, adalah adanya rasa kebersamaan dari masing-masing provinsi dengan tidak hanya mengedepankan kepentingan daerahnya saja, melainkan disadari adanya kepentingan bersama yang dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan kawasan yang terintegrasi.

“Kalau dulu masing-masing provinsi berjalan sendiri-sendiri, dengan adanya forum ini menjadi lebih ada rasa kebersamaan untuk membangun Kalimantan dan maju bersama-sama.”¹¹

Pada 2011, FKRP 2 R K mengajukan beberapa usulan prioritas pembangunan Pulau Kalimantan tahun 2012 yang dibahas dalam Forum Musrenbang Regional Kalimantan. Usulan prioritas tersebut merupakan hasil identifikasi kebutuhan pembangunan masing-masing provinsi yang telah diintegrasikan.

b. *Kalimantan Tourism Board (KTB)*

KTB ini lahir dikarenakan Kalimantan yang keempat provinsinya memiliki kendala serta permasalahan yang sama dalam pengembangan sektor pariwisata. Oleh karena itu, model pembangunan pariwisata yang bersifat *co-operative* antara Provinsi Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar merupakan suatu terobosan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.

Menilik dari kekhasan perkembangan pariwisata di Kalimantan, maka KTB nantinya cenderung akan diarahkan pada misi sebagai berikut:

- 1) Membangun *branding* bersama untuk membangun kesadaran global tentang budaya, atraksi dan keajaiban Kalimantan yang unik;
- 2) Membangun komunikasi lintas sektor dan bidang di lintas Provinsi, dengan misi utama memasarkan dan

¹¹ *Ibid.*

- mempromosikan Kalimantan sebagai tempat wisata unggulan;
- 3) Meriset dan mengidentifikasi secara akurat terhadap aspek pasar wisata dan produk wisata secara seimbang (*balancing between supply & demand*);
 - 4) Mereposisi pariwisata Kalimantan dalam kontelasi nasional dan internasional;
 - 5) Menstrukturisasi rute-rute domestik (*one trip journey*) dan menciptakan iklim lama tinggal wisatawan (*length of stay*);
 - 6) Merangsang investor raksasa di sektor pariwisata untuk menanamkan modalnya; dan
 - 7) Menjaga dan saling mengawasi kualitas atraksi (alam dan budaya).

Sayangnya tidak banyak informasi yang bisa diperoleh tentang KTB ini, bahkan di beberapa provinsi, yaitu Kalsel, Kalteng, dan Kaltim tidak ada informasi yang memadai berkaitan dengan KTB. Hal ini mencerminkan bahwa dokumentasi pelaksanaan kerjasama antarprovinsi tidak ditata dengan baik dan informasi antar pejabat terkait tidak simetris.

Model kelembagaan pelaksanaan kerjasama di Kalimantan ini, mengacu kepada pendapat Gary D. Taylor, merupakan model *Jointly-Formed Authorities*, atau lebih populer dengan Sekretariat Bersama.¹² Pasal 24 PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah sebenarnya telah peluang kepada daerah untuk membentuk Badan Kerja

Sama di luar SKPD. Hal ini berkaitan dengan keberadaan FKRP2RK yang sudah ada sejak 1986 dan hingga saat ini masih berbentuk forum koordinasi dan konsultasi. Walaupun bukan suatu keharusan, tetapi kelembagaan tersebut memberikan peluang pengelolaan kerjasama menjadi lebih fokus.

2. Kendala Pelaksanaan Kerjasama

Keberadaan forum kerjasama seperti FKRP2RK seharusnya bisa menjembatani beberapa isu strategis yang menjadi persoalan di Kalimantan. Pemanfaatan kerjasama antar daerah hingga saat ini masih kurang maksimal, sehingga forum-forum yang ada maupun kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani sebagian masih sebatas dokumen, dan belum banyak kegiatan yang konkrit.

Kurangnya pemanfaatan kerjasama antar daerah sebagai upaya strategis peningkatan pembangunan daerah diakui oleh aparatur di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Hal ini karena kendala klasik yang dihadapi seperti pada aspek hukum, keterbatasan pedoman teknis dan keterbatasan kapasitas SDM.”¹³

Karena melalui forum kerjasama tersebut, masing-masing daerah bisa meningkatkan daya atau kekuatan untuk menutupi keterbatasannya. Di Kalsel, MoU yang telah ditandatangani antara Kalsel dengan Jatim belum

¹² Gary D. Taylor, sebagaimana dikutip Antonius Tarigan, *Kerjasama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah*, dalam http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=161, diunduh 25 Januari 2011

¹³ *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan Tim Peneliti dengan para Pejabat dari Pemprov Kaltim, dilaksanakan di Kantor PKP2A III LAN, Samarinda, 21 Juni 2011.

diimplementasikan dalam program/kegiatan yang konkrit sehingga hanya sebatas dokumen kesepakatan kerjasama.

Persoalan lemahnya koordinasi antar unit/SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama menyebabkan pengarsipan dokumen hasil-hasil pelaksanaan kerjasama menjadi tidak lengkap. Secara teknis operasional, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh SKPD teknis terkait, sehingga data-data hasil pelaksanaan kerjasama tersebar di masing-masing SKPD. Faktor kelembagaan yang menangani urusan kerjasama pada level Sub Bagian di Provinsi Kalsel diklaim sebagai penyebab sulitnya koordinasi dengan SKPD terkait sehingga ada keterputusan informasi di antara SKPD mengenai pelaksanaan kerjasama.

Selain kerjasama regional dalam lingkup Kalimantan, beberapa provinsi juga melakukan kerjasama bilateral dengan provinsi lain di luar Kalimantan. Provinsi Kaltim telah menjalin kerjasama dengan Provinsi DI Yogyakarta dan Lampung ketenagakerjaan. Demikian juga Kalsel telah menjalin kesepakatan kerjasama dengan Jatim dan Sulsel. Kerjasama bilateral antar provinsi tersebut lebih mengarah kepada pelaksanaan kegiatan secara konkrit.

Keberadaan PP No. 19 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP No. 23 Tahun 2011 merupakan peluang gubernur untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik baik dalam konteks wilayah provinsinya maupun antarprovinsi dalam regional Kalimantan. Dalam konteks ini maka peran gubernur

menjadi sangat strategis, baik dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama pembangunan daerah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi maupun dalam menjalin hubungan kerjasama dengan provinsi lain.

3. Menuju Kalimantan Terintegrasi

Kalimantan *Incorporated* atau Kalimantan terintegrasi adalah konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini melalui pembangunan daerah di Kalimantan yang terpadu dalam rangka memenuhi pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan terintegrasi berarti sinerginya pembangunan daerah di Kalimantan, dan tidak adanya keterisolasian antara satu provinsi dengan provinsi yang lain serta satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota yang lain, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kalimantan secara mandiri. Oleh karena itu kerjasama antar daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan Kalimantan yang mandiri.

Keberadaan forum kerjasama seperti FKRP2RK merupakan modal awal untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan antar provinsi di Kalimantan. Namun, hingga saat ini, forum FKRP2RK empat gubernur tersebut masih sebatas pertemuan formal dan belum terimplementasikan dalam program/kegiatan yang secara signifikan dirasakan pengaruhnya terhadap masyarakat di daerah. Hal ini dapat terlihat dari visi dan misi masing-masing kepala daerah yang belum mencerminkan konsep pembangunan Kalimantan secara terpadu, melainkan

lebih pada visi dan misi yang bersifat politis untuk menarik suara masyarakat. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pergantian visi dan misi pemerintah daerah seiring dengan pergantian kepala daerah, sehingga tidak terjadi kesinambungan karena bergantung pada kepentingan politik saat itu.¹⁴

Sebaliknya, menurut informan dari lingkungan pemerintah provinsi, keberadaan FKRP2RK memberikan manfaat yang besar terhadap pembangunan daerah. Seperti yang terjadi di Kalteng sebagai provinsi yang memiliki infrastruktur yang terbatas dibandingkan provinsi-provinsi tetangganya. Sebelum tahun 2008, kabupaten/kota di Kalteng bagian utara sebagian besar lebih mudah diakses dari Provinsi Kalsel. Meskipun belum menyentuh langsung seluruh masyarakat Kalteng. Dalam jangka panjang dapat dipastikan bahwa manfaat itu dapat dirasakan merata seluruh rakyat selama keberadaan forum ini benar-benar dijadikan media untuk menyatukan seluruh kepentingan masyarakat Kalimantan.

Demikian juga keberadaan forum ini bisa meningkatkan posisi tawar Kalimantan dan membangun kebersamaan antar provinsi di Kalimantan. Sebagaimana diungkapkan informan bahwa melalui forum regional tersebut kebersamaan antar provinsi didasari kepentingan bersama melalui perencanaan pembangunan kawasan yang terintegrasi. Berdasarkan dua pandangan informan tersebut maka manfaat forum ini masih pada lingkup

yang terbatas, yaitu di tingkat pemerintah dan sebagian masyarakat, belum menyentuh masyarakat secara luas. Karena ada atau tidak ada forum tersebut pembangunan tetap akan berjalan.

FKRP2RK perlu ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang lebih konkrit, dan bukan hanya forum koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan. Beberapa isu strategis yang mendesak berkaitan dengan permasalahan dalam pembangunan yang dihadapi masyarakat di Kalimantan secara umum diantaranya adalah infrastruktur jalan, pemenuhan kebutuhan/suplai bahan pangan, konektivitas udara, keterbatasan listrik, penataan ruang, dan keterbatasan SDM.

Infrastruktur jalan (konektivitas darat) di Kalimantan merupakan salah satu persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat. Bukan hanya konektivitas antar kabupaten/kota, tetapi konektivitas antar provinsi pun belum sepenuhnya tersedia dengan baik. Dari empat provinsi di Kalimantan, Provinsi Kalbar yang paling terisolasi dengan ketiga provinsi lainnya. Sedangkan konektivitas antara Kalteng dan Kalsel relatif paling bagus dibanding dengan yang lain.

Permasalahan infrastruktur (termasuk jalan dan listrik) merupakan faktor yang menjadi penyebab rendahnya daya saing Indonesia. Peringkat daya saing Indonesia, menurut *The Global Competitiveness Report 2011-2012* yang dikeluarkan *World Economic Forum*, mengalami

¹⁴ Wawancara dengan Muttaqin Hidayatullah, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 22 Juni 2011.

penurunan dari posisi ke-44 tahun 2010 menjadi posisi ke-46 dari 142 negara tahun 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan infrastruktur yang memadai, birokrasi yang tidak efisien dan faktor aturan ketenagakerjaan.¹⁵ Infrastruktur yang layak, seperti ketersediaan sarana jalan raya, listrik dan air bersih, akan menunjang aktivitas investasi dan perekonomian secara luas. Selain itu, ketersediaan infrastruktur tersebut juga berpotensi meningkatkan akses dan mobilitas warga serta perbaikan pelayanan publik sehingga memperkecil dan bahkan menghilangkan keterisolasian warga.

Pemenuhan kebutuhan pangan di Kalimantan sangat tergantung suplai dari Sulawesi dan Jawa. Sehingga ketika terjadi kendala transportasi dan cuaca buruk maka suplai tersebut berpotensi terganggu karena angkutan bahan pangan sangat mengandalkan sarana transportasi laut. Sementara di kawasan perbatasan seperti di Kabupaten Nunukan (Kaltim) dan sekitarnya serta kawasan Entikong (Kalbar) dan sekitarnya yang berbatasan dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak (Malaysia), sebagian kebutuhan masyarakat sehari-hari disuplai dari negara tetangga tersebut.

Dari aspek konektivitas udara, jalur penerbangan antara dua provinsi yaitu Kaltim dan Kalsel sudah terhubung dengan dilayani pesawat berbadan besar antara Bandara Sepinggang di Kota Balikpapan (Kaltim) dari dan ke Bandara

Syamsuddin Noor di Kota Banjarbaru (Kalsel). Sementara jalur perhubungan udara menuju Kalteng dan Kalbar dari Kalsel dan Kaltim saat ini dilayani pesawat kecil berpenumpang sekitar 50 orang.

Kalteng yang berbatasan langsung dengan Kalsel, dan jarak antar kedua Ibukota Provinsi tersebut tidak terlalu menjadi persoalan karena akses darat bisa ditempuh dalam waktu 4-5 jam antara Kota Palangkaraya (dimana lokasi Bandara Tjilik Riwayat berada) dari dan ke Banjarmasin. Kemudian dari Kota Banjarmasin diperlukan waktu sekitar 30 menit menuju ke Kota Banjarbaru, lokasi Bandara Syamsuddin Noor. Namun demikian perhubungan udara bisa dilayani dari Banjarbaru ke Sampit dengan pesawat kecil berpenumpang sekitar 50 orang. Hanya penerbangan dari dan ke Kalbar yang secara langsung belum tersedia. Selama ini penerbangan dari dan ke Kalbar hanya dilayani oleh pesawat kecil berpenumpang sekitar 50 orang dengan melalui transit di beberapa kota, yaitu mulai dari Pontianak dan Ketapang (Kalbar), menuju Pangkalan Bun dan Sampit (Kalteng) serta Banjarbaru (Kalsel). Alternatif yang lain adalah melalui penerbangan yang transit ke Jawa dan kemudian dilanjutkan dengan penerbangan ke Balikpapan, Palangkaraya atau Banjarbaru, demikian pula sebaliknya.

Pembukaan konektivitas udara antar provinsi di Kalimantan sebenarnya bisa dilakukan jika keempat provinsi tersebut menjalin kerjasama dengan maskapai

¹⁵ <http://bisnis.vivanews.com/news/read/245496-peringkat-daya-saing-ri-turun--ini-alasannya> diunduh 8 September 2011

penerbangan. Dalam upaya membuka akses masyarakat di bidang penerbangan dengan luar daerah, Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi salah satu daerah yang bisa dijadikan referensi bagi daerah lain. Kabupaten di Provinsi Kalteng tersebut memiliki Bandara H. Asan yang berada di Sampit, Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur, melayani penerbangan dari dan ke 2 kota di Jawa yaitu Jakarta dan Surabaya. Pelayanan penerbangan ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Maskapai Penerbangan Merpati, sebuah Maskapai Penerbangan milik negara (BUMN) dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO).

Kerjasama dengan maskapai penerbangan juga dilakukan di daerah lain, seperti Pemerintah Kabupaten Malinau di Kaltim, yang bekerja sama dengan maskapai penerbangan swasta Susi Air, yang melayani jalur penerbangan perintis dengan pesawat kecil berpenumpang 12 orang. Dengan model kerjasama tersebut masyarakat di kawasan pedalaman bisa terbuka aksesnya untuk menuju Ibukota Malinau dan juga menuju Kota Tarakan, pintu gerbang perhubungan udara Kaltim di wilayah utara yang berdekatan dengan Negara Bagian sabah, Malaysia.

Sebagaimana diungkapkan Yeremias T. Keban¹⁶, bahwa setidaknya ada tujuh alasan perlunya kerjasama antar daerah. kemudian dengan terbitnya PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah direvisi

dengan PP Np. 23 Tahun 2011 memperkuat posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Gubernur bisa mengkoordinasikan kabupaten/kota terkait hubungan kerjasama pembangunan dan pelayanan publik antar daerah baik dalam lingkup provinsi maupun lintas provinsi. Sehingga sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi saja tetapi juga dilakukan oleh kabupaten/kota.

Dengan demikian, keberadaan forum kerjasama regional di Kalimantan bisa digunakan sebagai media untuk mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi di wilayah regional Kalimantan, untuk meningkatkan percepatan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik. Sehingga ke depan diharapkan bisa terwujud kemandirian regional Kalimantan.

F. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian tentang praktek pelaksanaan kerjasama antarprovinsi di Kalimantan di atas serta dalam rangka menjawab tujuan penelitian ini maka disimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Hubungan kerjasama antar provinsi dalam lingkup regional Kalimantan diwujudkan dengan membentuk otoritas bersama (*joint formed authorities*) yaitu forum koordinasi dan konsultasi yang termanifestasi dari terbentuknya FRKP2RK dan sebuah badan yang bernama KTB.

¹⁶Keban, Yeremias T., *op.cit.*

Kemudian kerjasama dengan provinsi di luar Kalimantan dilakukan secara bilateral.

- b. Efektivitas hubungan kerja tersebut masih rendah, karena forum tersebut hanya sebatas forum pra musrenbang regional untuk menginventarisasi persoalan dan usulan yang akan dibahas di forum musrenbang regional maupun dibawa ke kementerian terkait, belum sampai kepada rencana aksi berupa program dan kegiatan yang konkrit.
- c. Prospek terwujudnya pembangunan Kalimantan yang terintegrasi (Kalimantan *Incorporated*) cukup terbuka, namun hal ini perlu komitmen dari semua provinsi dan didukung oleh pelaku usaha (swasta maupun BUMN/BUMD) serta masyarakat sebagai tiga pilar pembangunan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam praktek kerjasama antardaerah adalah minimnya pedoman atau peraturan sebagai panduan pelaksanaan kerjasama, minimnya kapasitas SDM aparatur pelaksana kerjasama, lemahnya koordinasi antar s a t k e r, s e r t a b e l u m r a p i n y a dokumentasi pelaksanaan dan hasil kerjasama. Oleh karenanya, perjanjian kerjasama maupun MoU yang sudah ditandatangani kadang belum diimplementasikan. Sedangkan disisi lain, kerjasama yang sudah dilakukan tidak didokumentasikan dengan baik sehingga ketika data tersebut diperlukan maka akan mendapatkan kesulitan untuk menemukannya.

2. Rekomendasi

Berkaitan dengan upaya meningkatkan efektifitas kerjasama antar provinsi di Kalimantan maka berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut dirumuskan saran yang perlu dilakukan oleh pihak terkait, yaitu:

- a. Perlu dibentuk badan kerjasama regional (non SKPD) yang melibatkan semua provinsi dalam lingkup Kalimantan sebagai metamorfosis dari FKRP2RK, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak hanya terbatas pada koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan, tetapi lebih dari itu adalah pengelolaan kerjasama dalam bentuk tindak lanjut program dan kegiatan yang lebih konkret. Keberadaan badan ini diharapkan bisa mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama regional karena lebih fokus pada isu-isu urgen yang dibutuhkan di regional Kalimantan dan tidak terganggu oleh pergantian kepala daerah.
- b. Perlunya menempatkan isu-isu mendesak sebagai prioritas seperti persoalan konektivitas antarprovinsi dan kabupaten/kota, suplai kebutuhan masyarakat, suplai energi listrik, penataan ruang, lingkungan, dan SDM sebagai persoalan yang harus segera diselesaikan. Dan selanjutnya menyusun *roadmap* penyelesaian terhadap persoalan-persoalan tersebut untuk diselesaikan secara bersama-sama dengan memanfaatkan badan kerjasama regional Kalimantan yang telah dibentuk.
- c. Membuka konektivitas antarkabupaten/kota dan antarprovinsi untuk menunjang

mobilitas masyarakat dan menghilangkan keterisolasian kawasan, meliputi:

- i. Konektivitas darat dilakukan dengan membangun prasarana infrastruktur jalan yang memadai (jalan negara maupun jalan provinsi) di Kalimantan sehingga terjadi konektivitas darat ke semua provinsi dan kabupaten/kota.
- ii. Konektivitas udara yang menghubungkan empat provinsi di Kalimantan dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan maskapai penerbangan sipil milik pemerintah (BUMN/BUMD) atau swasta untuk melayani rute penerbangan antarprovinsi.
- d. Perlu nyakoordinasi dan komunikasi antara SKPD dengan unit yang menangani urusan kerjasama di Sekretariat Daerah serta penataan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan kerjasama yang telah dilaksanakan SKPD oleh unit yang menangani urusan kerjasama di Sekretariat Daerah untuk mencegah terjadinya keterputusan informasi antar unit maupun antar pejabat berkaitan dengan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan kerjasama antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (tanpa tahun).

Pengembangan Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah: Persoalan dan Peluangnya. Jakarta: Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan

Daerah – Bappenas,.

Dawud, Joni, et. al. (2003). *Hubungan Kerjasama Pembangunan antar Daerah*. Bandung: PKDA I LAN.

Domai, Tjahjanulin. (2009).

Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Daerah (Studi Kerjasama Antar Daerah dalam Perspektif Sound Governance). Disertasi doktor. Malang: Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Dunn, William N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gama Press. Edisi kedua

<http://bisnis.vivanews.com/news/read/245496-peringkat-daya-saing-ri-turun--ini-alasannya> diunduh 8 September 2011

Keban, Yeremias T. (tanpa tahun). *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu, Strategis, Bentuk dan Prinsip*, dalam <http://www.bappenas.go.id/node/48/2258/kerjasama-antar-pemerintah-daerah-dalam-era-otonomi-oleh-yeremias-t-keban-/>, diunduh 25 Januari 2011.

Sinaga, Murbanto. (2005). *Model Kerjasama Antar Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Karya Tulis Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dalam <http://library.usu.ac.id/downl>

oad/fe/06009591.pdf
diunduh 7 Juli 2011.

Tarigan, Antonius. (tanpa tahun).
*Kerjasama Antar Daerah
(KAD) Untuk Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan*

*Publik dan Daya Saing
Wilayah*. d a l a m
[http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart
&idart=161](http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=161), diunduh 25
Januari 2011

